

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi dunia semakin meningkat diakibatkan adanya persaingan global pada negara-negara yang sedang berkembang. Negara berkembang harus memiliki strategi dan inovasi dalam menjalankan sistem perekonomian negara agar mampu bersaing dan berkontribusi secara langsung. Tingkat pertumbuhan ekonomi sebuah negara tentu tidak hanya terbentuk dari manajemen pengelolaan sumber daya alam yang profesional namun juga harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan solusi dan inovasi dalam setiap perkembangan sektor ekonomi yang dihasilkan (asyafiq, 2019). Sektor ekonomi yang dibentuk berdasarkan perilaku dari berbagai kategori, nasional, perusahaan, investor, dan konsumen, yang disebabkan dari kondisi ekonomi masa lalu, saat ini, dan harapan di masa depan. Selama 20 tahun terakhir atau tahun (2004) ekspansi perdagangan internasional telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan integrasi dan interkoneksi ekonomi dunia, krisis global, dan pola arus perdagangan baru merupakan faktor kunci yang mengubah dinamika perdagangan internasional (sukmana, 2022).

Perkembangan ekonomi yang pesat tidak secara otomatis berdampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan suatu Negara. Namun dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka sebuah Negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari perkembangan PDB

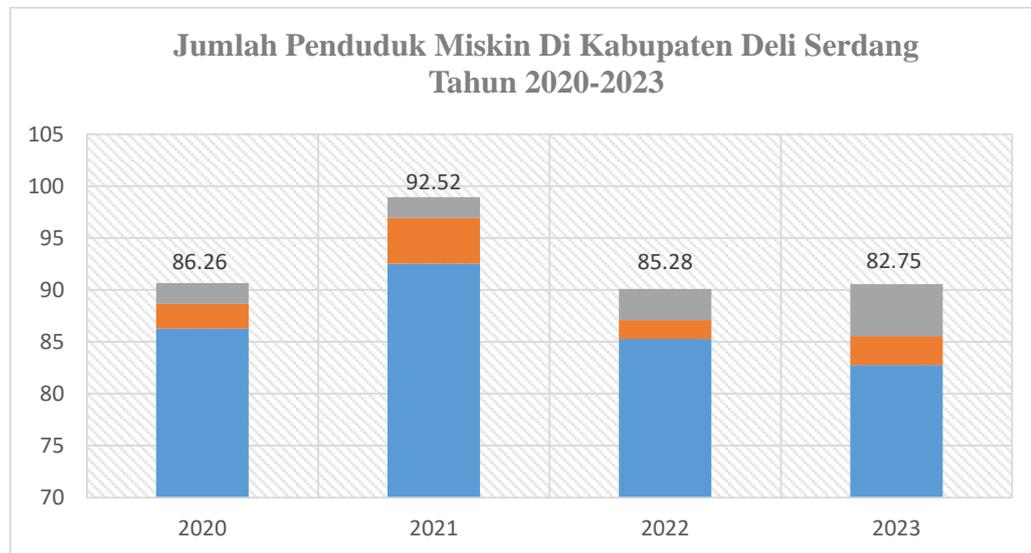
(Produk Domestik Bruto), semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa semakin meningkatnya produksi Negara tersebut, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat, dan peningkatan pertumbuhan perekonomian ini dapat mengurangi kemiskinan suatu Negara (herawati, 2022).

Perekonomian akan memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara universal. Perekonomian yang buruk akan berdampak terhadap kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan pada suatu negara harus segera diatasi agar suatu negara dapat berkembang menjadi lebih baik. Salah satu indikator negara dikatakan baik adalah ketika tingkat kemiskinannya rendah. Sehingga diperlukan adanya solusi dalam mengatasi kemiskinan (Hany, & Islamiyati, 2020).

Menurunkan angka kemiskinan tidak bisa instan akan tetapi harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan serta membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik lokal, nasional bahkan internasional. Berbagai kajian sudah dilakukan untuk mengelompokkan masyarakat miskin dan juga mengetahui penyebab dari kemiskinan tapi hal tersebut belum terselesaikan dengan baik, hal ini disebabkan karena pertama kemiskinan disebabkan karena berbagai kondisi serta bersifat multidimensional, kedua data masyarakat miskin tidak akurat sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang tepat (Purnomo, 2021).

Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan suatu masalah yang selalu terjadi dari masa ke masa dan menjadi perhatian utama, karena kemiskinan selalu dikaitkan dengan kesenjangan dimasyarakat. Segala upaya pembangunan terus digencarkan oleh pemerintah baik diperkotaan ataupun didaerah hal ini dilakukan

untuk menurunkan angka kemiskinan tapi faktanya masalah ini belum terselesaikan secara tuntas khususnya di negara yang berkembang seperti indonesia (Adhitya, et al., 2022).



**Gambar 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2023**

*Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020 - 2023, diolah.*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2020, sebesar 86,26 ribu jiwa, pada tahun 2021 92,52 ribu jiwa, dilanjut pada tahun 2022 sebesar 85,28 ribu jiwa, dan pada tahun 2023 sebesar 82,75 ribu jiwa. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 22 kecamatan, 14 kelurahan, dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241,68 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 2,03 juta jiwa (2023), dengan tingkat kepadatan penduduk 782,00 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan ibu kota kabupaten Lubuk Pakam, daerah ini dikenal dengan salah satu dari 33 kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang juga dikenal memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang besar sehingga menjadi daerah yang memiliki peluang cukup investasi yang cukup menjanjikan (Susenas, 2023).

Seperti yang terjadi di desa Tumpatan Nimbang, Kecamatan Batang Kuis ini. Mata pencaharian masyarakat golongan ke bawah, rata-rata berprofesi sebagai petani, pedagang kecil dan kuli bangunan. Pada tahun 2018 didirikannya BWM Mawaridussalam yang secara tidak langsung menghidupkan perekonomian di desa tersebut dengan terbukanya peluang untuk membuat usaha yang diperlukan orangtua santri ketika mengunjungi putra atau putri mereka di pondok. Hal ini tentu saja memberi angin segar bagi pelaku usaha untuk mulai membuka usahanya agar terlepas dari jerat kemiskinan. Tidak hanya peluang dari permintaan para santri yang banyak, peluang lainnya pun di dapatkan dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Namun yang menjadi kendala terbesar masyarakat dalam menjalankan usahanya ada pada permodalan dan cara manajemen usaha sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Keberadaan pondok dianggap strategis dan menjadi kekuatan tersendiri yang diharapkan mampu mentransformasikan potensinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Suwito, 2022).

Dari sisi perbankan di kabupaten deli serdang pemberian layanan terhadap masyarakat berpendapatan rendah terlalu mahal biayanya karena tingginya biaya transaksi dan informasi. Perbankan membutuhkan investasi yang tinggi untuk membuka outlet atau kantor cabang, juga dalam penyediaan tenaga kerja. Kondisi ini tidak sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh karena masyarakat pada segmen ini hanya menabung dan meminjam dana dengan nilai nominal yang kecil-kecil. Pinjaman yang relatif kecil ini menyebabkan perbankan segan untuk memberikan kredit pada segmen kelompok ini. Pertimbangan efisiensi dalam penyaluran kredit kepada masyarakat miskin ini sering menjadi pertimbangan

utama bagi perbankan, di samping juga masalah ketiadaan collateral bagi masyarakat miskin, sehingga diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi tersebut (Mulyaningsih, et al., 2019).

Hal inilah yang menjadi latar belakang munculnya keuangan mikro di negara berkembang, sebagai upaya memperbaiki akses bagi rumah tangga miskin ke pasar keuangan. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan LKM konvensional, namun ada beberapa perbedaan dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga (Inayatul, 2019).

Apalagi dalam Islam, pengembangan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) pada saat ini, harus mempedomani mekanisme penyelesaian masalah kemiskinan sebagaimana praktik-praktik keuangan mikro yang telah ada dan berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. LKMS dapat menjalankan fungsi komersial namun tidak boleh melupakan tujuan utama pengentasan kemiskinan (Hulwati, & Rozalinda, 2019).

Lembaga Keuangan Mikro syariah memiliki karakteristik khusus yakni memberikan dana kepada usaha mikro/kecil dan masyarakat miskin. Oleh karena itu, dalam menilai kinerja suatu lembaga keuangan mikro harus memperhatikan ukuran jangkauan (*outreach*). Jangkauan (*outreach*) merupakan kemampuan LKM dalam memberikan pelayanan jasa keuangan yang mengacu pada jumlah nasabah yang dilayani. Jangkauan tersebut dibedakan menjadi dua yaitu kedalaman jangkauan (*depth of outreach*) dan keluasan jangkauan (*breadth of outreach*). Dengan pertumbuhan yang cepat dari kredit mikro, luasnya jangkauan juga meningkat baik di tingkat industri dan juga ditingkat individu LKM. Namun,

suatu lembaga keuangan mikro yang lebih memperhatikan luas jangkauan cenderung sulit untuk memiliki perhatian yang sama dengan kedalaman jangkauan karena keduanya membutuhkan sumber daya yang besar (Handayani,2013). Akibatnya, kedalaman jangkauan menerima perhatian lebih dari semua pihak yang peduli tentang penjangkauan sosial keuangan mikro secara keseluruhan, termasuk pembuat kebijakan. Keterbatasan dalam mengukur kedalaman jangkauan adalah tidak adanya informasi pendapatan guna mengukur tingkat kemiskinan peminjam. Karena data kekayaan peminjam tidak dikumpulkan sehingga data pendapatan/kekayaan tidak tersedia. Oleh karena itu ukuran yang paling banyak digunakan adalah rata-rata jumlah pinjaman perpeminjam (*Average Outstanding Loans/AOL*). Berdasarkan informasi Pengelola LKMS, syarat besarnya kredit yang diminta adalah sesuai dengan kemampuan peminjam dalam mengembalikan kredit. Sehingga diduga ada korelasi yang kuat antara rata-rata jumlah pinjaman dengan rata-rata jumlah pendapatan dan jumlah pendapatan merupakan indikator dalam mengukur kemiskinan. Quayes (2012) mengungkapkan, meskipun tidak ada ukuran yang sempurna dari tingkat kemiskinan, itu sangat baik dalam mengukur kedalaman jangkauan karena ada korelasi positif yang kuat antara tingkat pendapatan dan ukuran pinjaman. Dalam kata lain, peminjam miskin akan lebih kecil ukuran pinjamannya (Siswanto, 2017).

Adanya Keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) dan jangkauan (*outreach*) layanan keuangan merupakan dua target (*double bottom line*) yang menjadi tujuan LKM. Terdapat beragam definisi dan pemahaman terkait dengan keberlanjutan LKM. Secara umum, keberlanjutan didefinisikan sebagai

kemampuan institusi untuk menutupi semua biaya yang termasuk biaya operasional dan keuangan. Terminologi keberlanjutan berarti keberadaan institusi dalam jangka panjang untuk mencapai tujuannya. Keberlanjutan LKM mempunyai dua bentuk yaitu keberlanjutan institusi dan keberlanjutan keuangan yang saling berkaitan. Terkait dengan ini, keberlanjutan LKM menunjukkan kemampuan LKM untuk memberikan layanan keuangan kepada kelompok nasabah yang luas secara terus-menerus. Sebagai lembaga keuangan yang menysasar masyarakat miskin, kinerja LKM secara umum ditentukan oleh kemampuannya untuk secara efektif dan efisien memberikan layanan berkualitas tinggi untuk berbagai macam dan tingkatan masyarakat miskin. (Sari, 2023)

Paxton dan Cuevas (Mulyaningsih, et al., 2019) mengemukakan bahwa *the depth outreach* mengindikasikan seberapa besar kelompok yang selama ini tidak memperoleh layanan dapat terjangkau oleh layanan lembaga. Di negara berkembang, kebanyakan institusi keuangan baik formal maupun semi formal secara konsisten tidak melayani beberapa kategori masyarakat, yaitu masyarakat miskin, perempuan, masyarakat perdesaan, dan tidak berpendidikan. Dengan tidak memperoleh layanan kredit maka masyarakat miskin terperangkap apa yang dinamakan "*avicious circle*". Mereka miskin karena rendahnya tingkat pendapatan yang menyebabkan rendahnya tabungan, sehingga menghambat investasi dikarenakan rendahnya pendapatan.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedalaman jangkauan *Depth of Outreach* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bagi masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Jangkauan *Depth of Outreach* mengacu pada sejauh mana LKMS dapat mencapai dan memberdayakan

masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren mawaridussalam, untuk mendukung pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dan kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan dari LKMS?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menilai efektivitas dan kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang .
2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan dari LKMS.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Secara teoritis, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jangkauan *Depth of Outreach* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bagi masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Kontribusi terhadap Teori Keuangan Mikro: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang keberhasilan LKMS dalam mencapai dan melayani masyarakat di pedesaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan keberlanjutan layanan keuangan mikro.
- b. Pengembangan Teori Pertanian dan Pembangunan Pedesaan: Analisis ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana layanan keuangan mikro dari LKMS dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, sehingga dapat memberikan kontribusi pada teori pertanian maupun perdagangan dan pembangunan pedesaan.
- c. Pengayaan Teori Keuangan Islam: Dalam konteks keuangan Islam, penelitian ini dapat menggambarkan efektivitas LKMS dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, sehingga dapat memperkaya literatur keuangan Islam.
- d. Peningkatan Kebijakan Publik: Hasil analisis dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan tentang bagaimana meningkatkan akses masyarakat miskin di kecamatan Batang Kuis terhadap layanan keuangan mikro syariah, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut.
- e. Pengembangan Metodologi Penelitian: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan metodologi

penelitian untuk mengukur *Depth of Outreach* LKMS atau lembaga keuangan mikro lainnya dalam konteks yang lebih luas.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, analisis kedalaman jangkauan *Depth of Outreach* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bagi masyarakat di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Peningkatan Akses ke Layanan Keuangan: Penelitian ini dapat membantu LKMS dan lembaga keuangan mikro lainnya untuk memahami lebih baik kebutuhan dan karakteristik masyarakat miskin di Kecamatan Batang Kuis, sehingga dapat meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan.
- b. Pengembangan Produk dan Layanan yang Lebih Sesuai: dengan memahami lebih baik kebutuhan dan karakteristik masyarakat, LKMS dapat mengembangkan produk dan layanan keuangan yang lebih sesuai dan relevan bagi mereka, seperti produk tabungan, kredit, dan asuransi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.
- c. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga: dengan meningkatkan akses dan penggunaan layanan keuangan mikro syariah, masyarakat di Kecamatan Batang Kuis dapat lebih mudah mengelola keuangan mereka, mengakses modal untuk investasi, dan melindungi diri dari risiko ekonomi, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.
- d. Peningkatan Keberlanjutan LKMS: Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, LKMS dapat

mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberlanjutan layanan keuangan mikro syariah mereka di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

- e. Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi Lokal: dengan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, analisis ini dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi lokal di Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, melalui peningkatan produksi dan konsumsi lokal serta penciptaan